



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PROSES BISNIS

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMONGAN**

REGULASI

1. Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Undang Undang No 02 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
3. Undang Undang no 03 Tahun 1992 Tentang Jamsostek
4. Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

Tugas Pokok dan Fungsi DISNAKER

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 72 Tahun 2016

Tugas

Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi

Fungsi

1. Penyusunan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
3. Pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
4. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

DUKUNGAN KINERJA DINAS PADA RPJMD

VISI
TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH
SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING

MISI 5	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL	MENINGKATNYA PENDUDUK YANG BEKERJA	Persentase Penduduk yang Bekerja	Meningkatnya Penempatan Kerja	Persentase Peningkatan Penempatan Kerja di Sektor Formal
			Meningkatnya Perlindungan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan
				Persentase Penyelesaian Perselisihan Kerja
			Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Peningkatan Pekerja yang Sudah Menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)

PROSES BISNIS DISNAKER

PROSES

PROSES BISNIS MANAJEMEN

- PENGELOLAAN KINERJA DAN ANGGARAN
- KEPATUHAN INTERNAL
- KEPATUHAN RESIKO

PROSES BISNIS INTI

- Meningkatnya Penempatan Kerja
- Meningkatnya Perlindungan Pekerja
- Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

PROSES BISNIS PENDUKUNG

- Perundang Undangan Yang Berlaku
- Sdm Yang Kompeten Peraturan
- Perencanaan Yang Baik
- Ketersediaan Sarana & Prasarana Serta Teknologi Informasi
- Ketersediaan Anggaran Yang Cukup

TUJUAN

Meningkatnya
Penduduk yang Bekerja

HASIL/ OUTPUT
Penduduk yang
Bekerja

MANFAAT/ BENEFIT
MENURUNNYA TPT

PROSES BISNIS MANAJEMEN



Pengelolaan Kinerja dan Anggaran :

Menyelaraskan visi dan misi, sesuai dengan Renstra. Dalam Pengelolaan Kinerja DISNAKER selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah di tetapkan. Pengelolaan Kinerja juga menyentuh aspek kepatuhan Internal dan Pengelolaan Resiko

Kepatuhan Internal :

Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP yang berlaku

Pengelolaan Resiko :

Memaksimalkan pencapaian tujuan dengan jalan merencanakan solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul

PERENCANAAN KEGIATAN

1. Penyelenggaraan Forum OPD

2. Input Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Penyusunan KUA / PPAS (DISNAKER)

4. Menyusun RKA

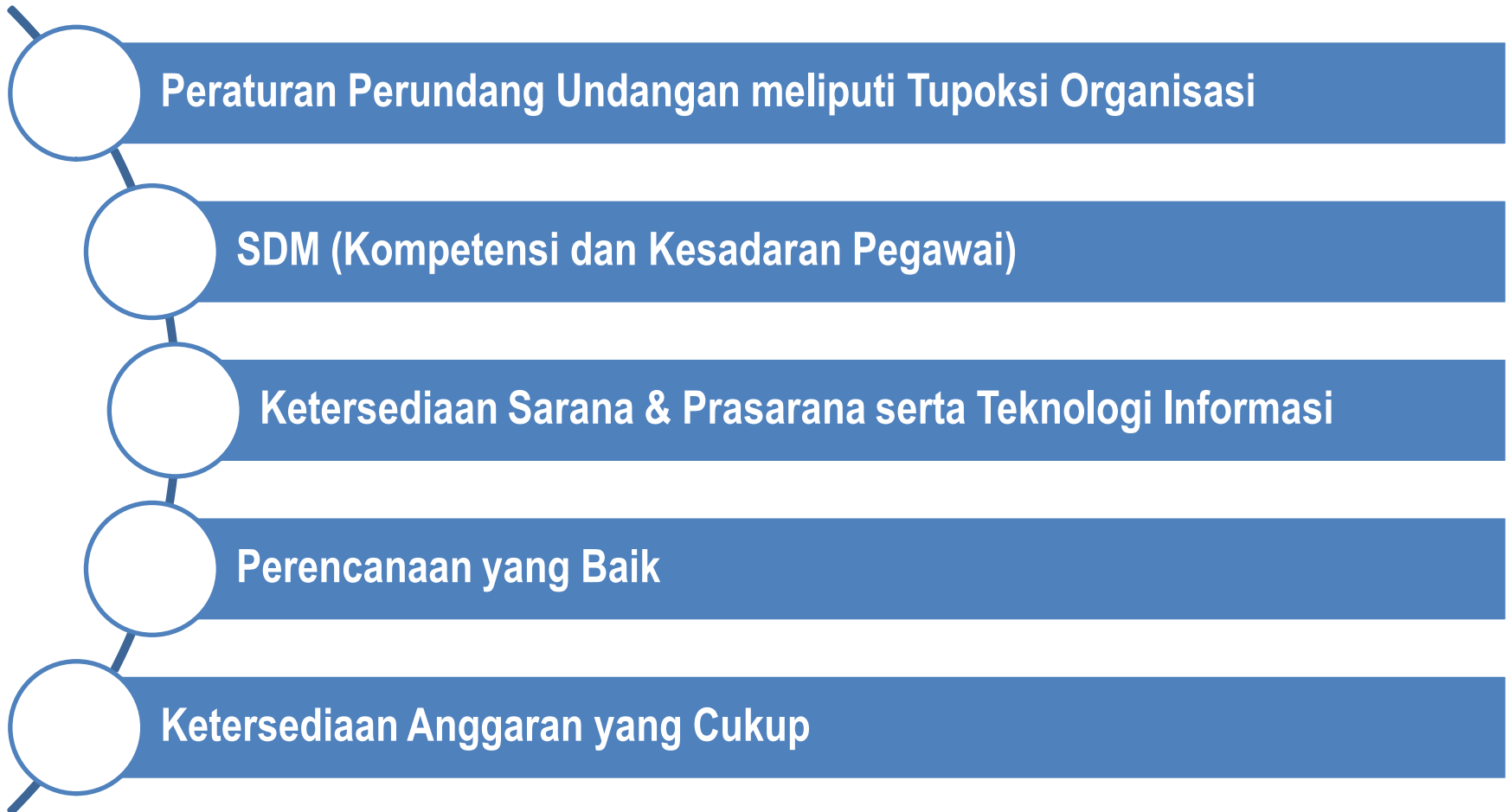
PELAPORAN

JENIS PELAPORAN :

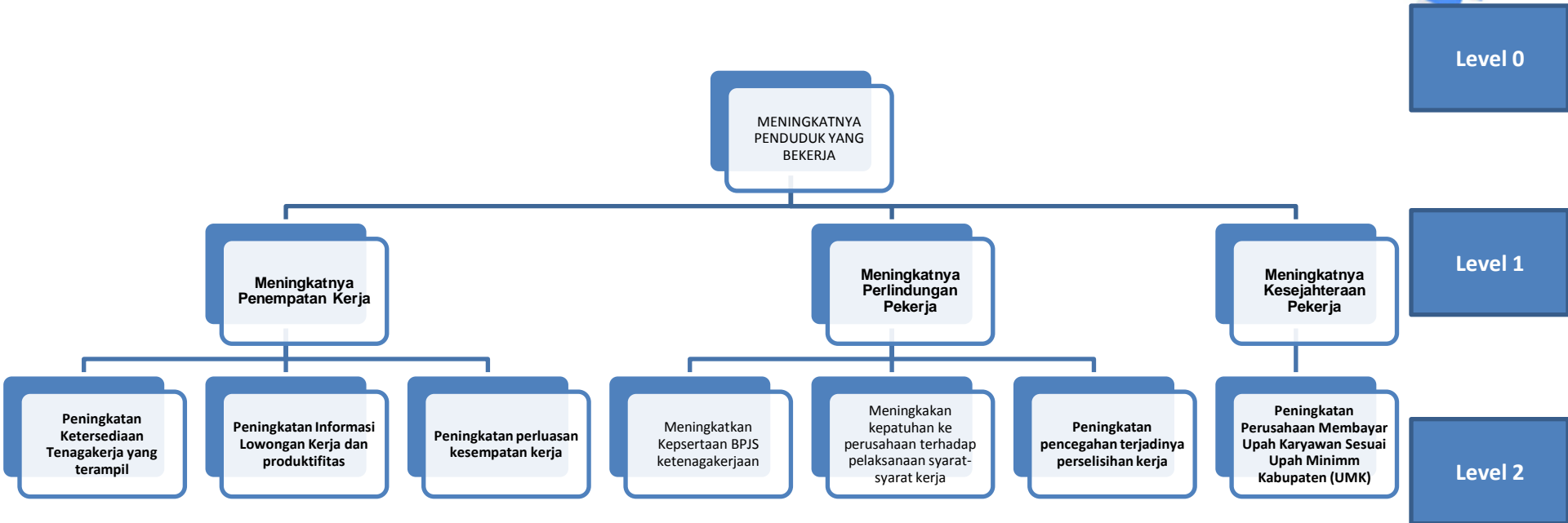
1. Laporan Keuangan Semester
2. Laporan Keuangan Akhir Tahun
3. LKjIP
4. LKPJ Bupati
5. LKjIP
6. LPPD
7. Input Laporan Fisik dan Keuangan



Proses Pendukung dalam Pelaksanaan Operasional Pada Dinas Tenaga Kerja:

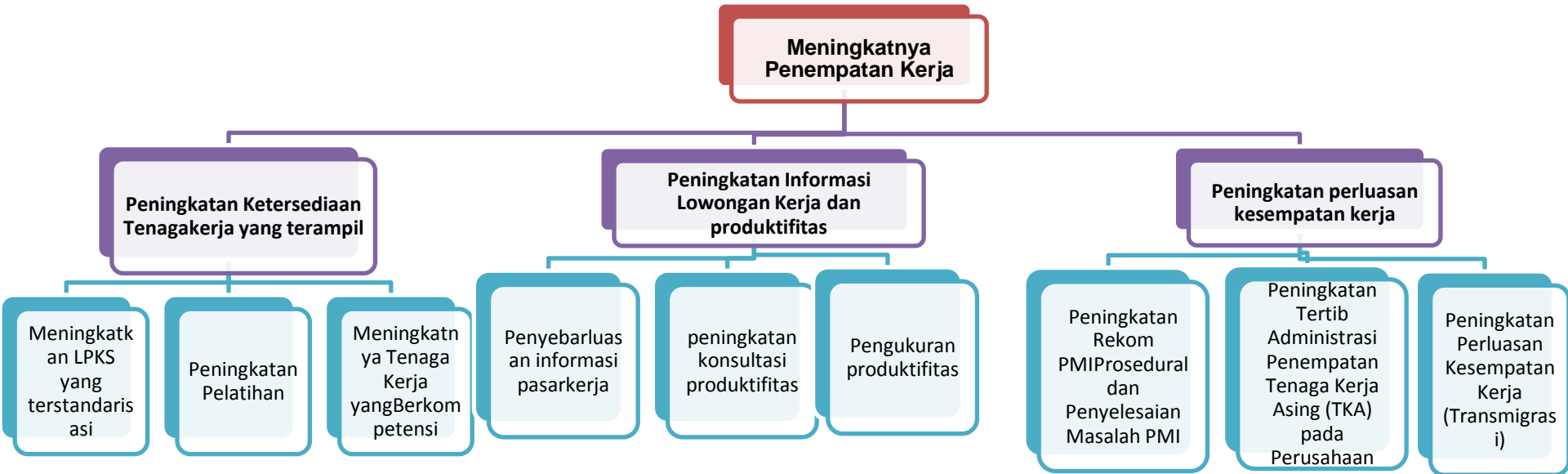


PROSES BISNIS MANAGERIAL



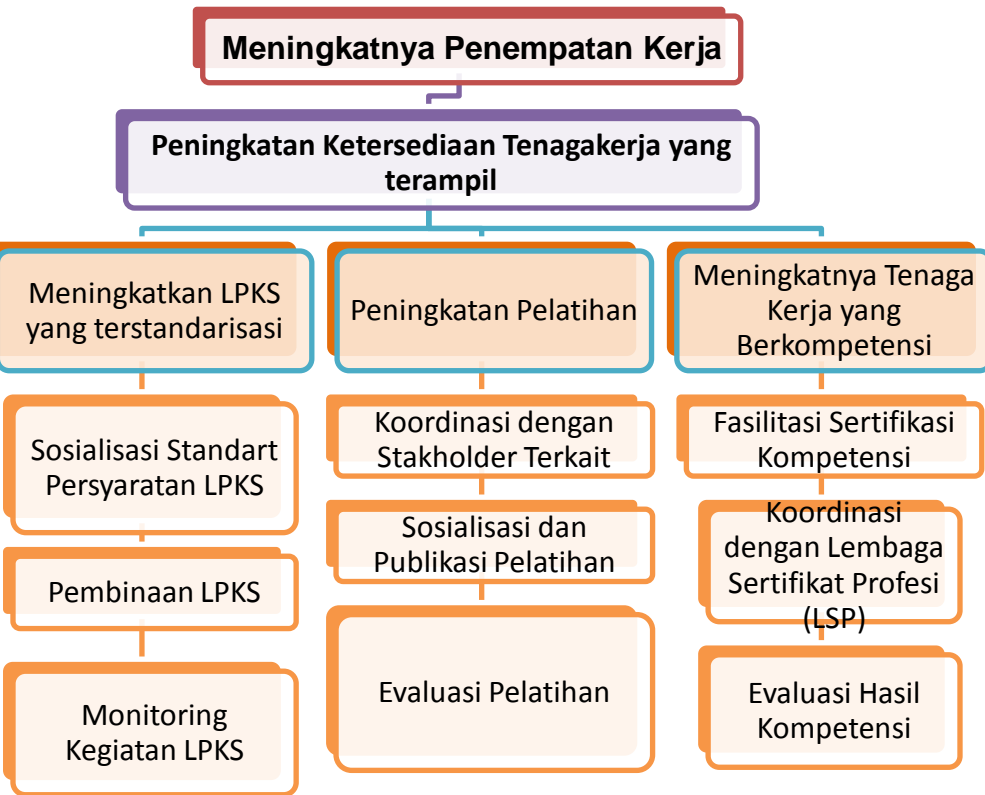
PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN



PROSES BISNIS

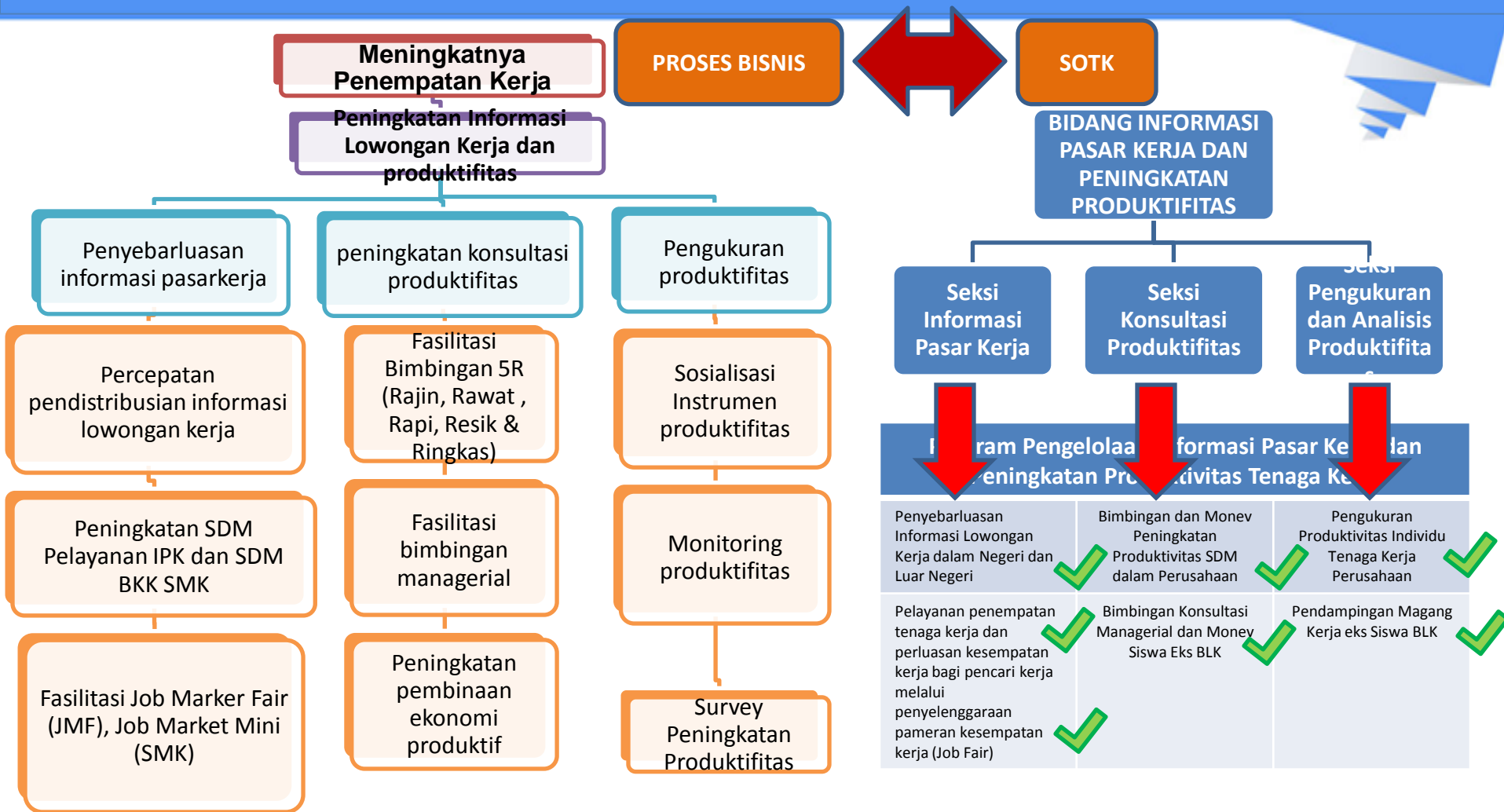
DALAM PENCAPAIAN SASARAN



Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		
Seksi Kelembagaan Pelatihan	Seksi Penyelenggaraan Pelatihan	Seksi Sertifikasi Kompetensi
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Penguatan sarana dan Prasarana Kelembagaan pelatihan	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis kompetensi
	Pembinaan dan pelatihan Keterampilan kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	

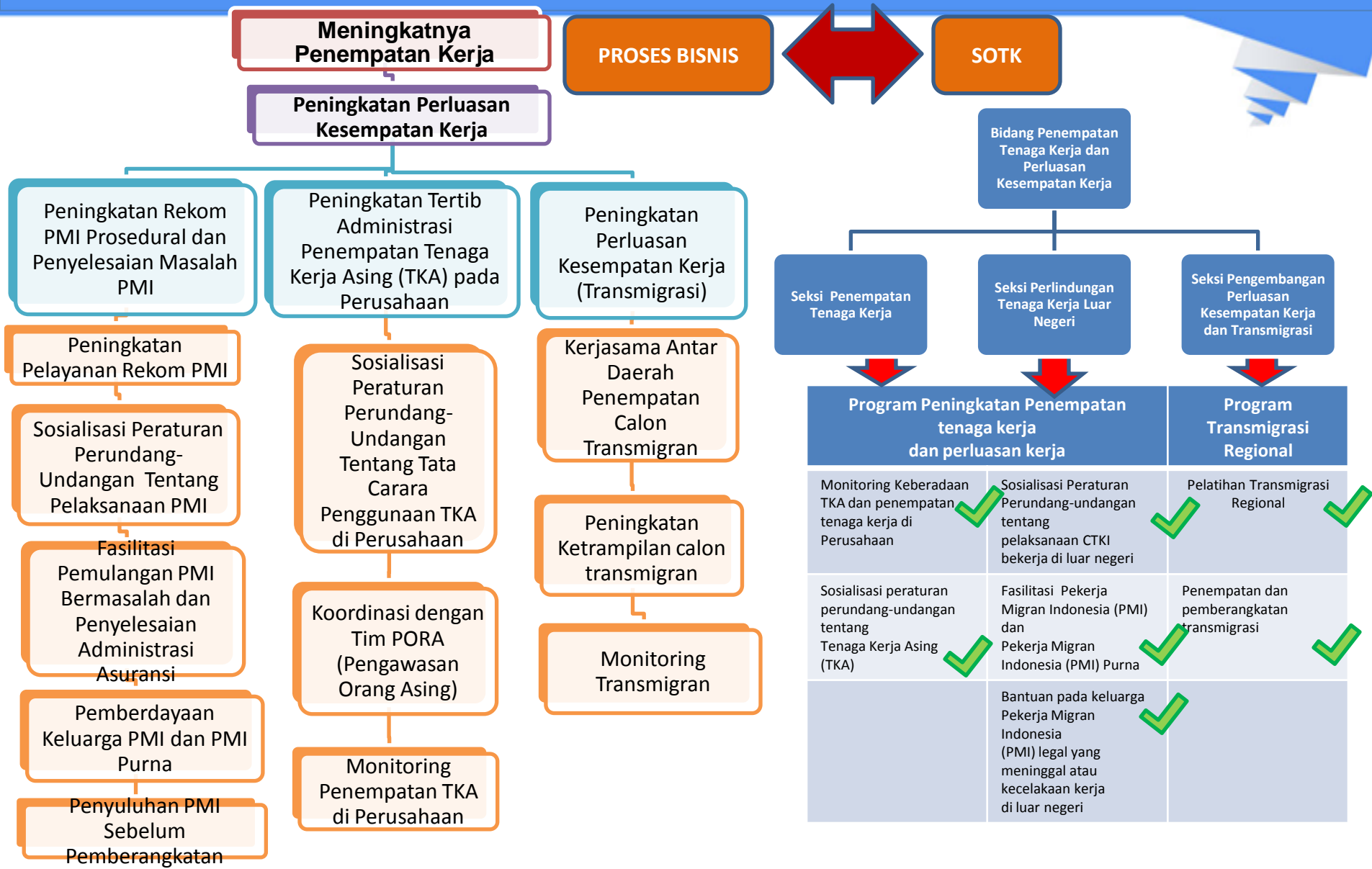
PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN



PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN



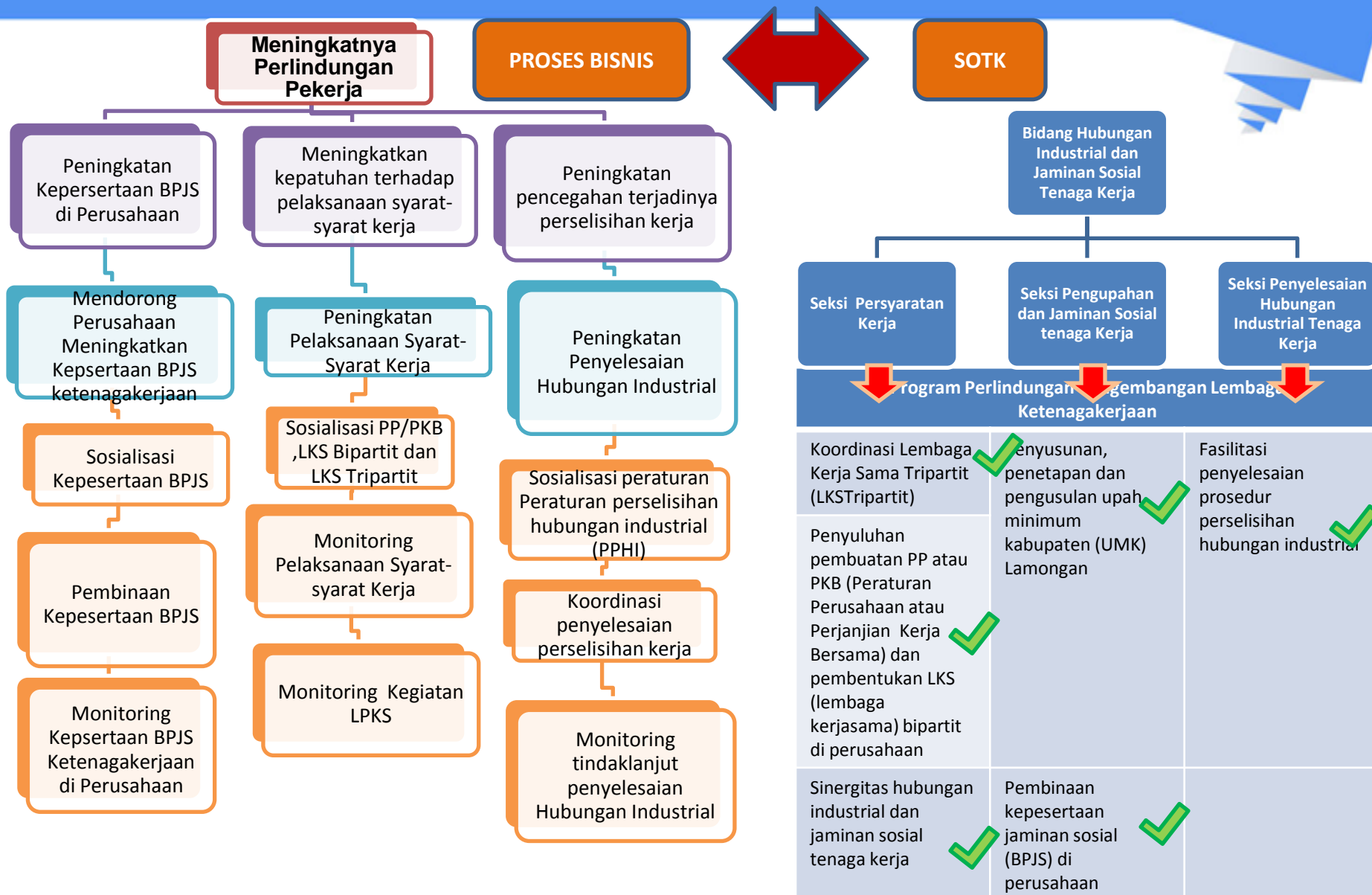
PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN



PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN



PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN

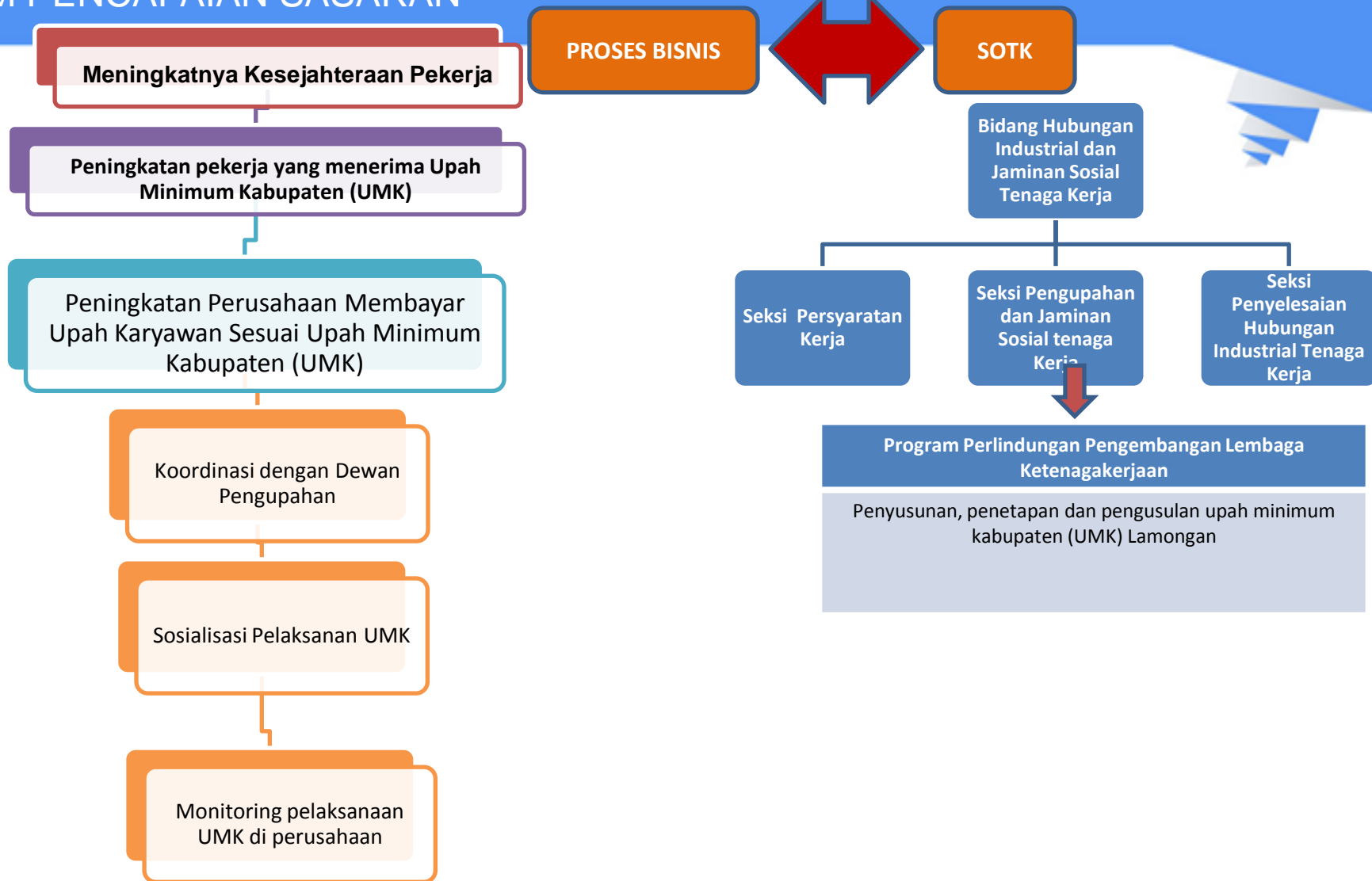
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

Peningkatan pekerja yang menerima Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Peningkatan Perusahaan Membayar Upah Karyawan Sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)

PROSES BISNIS

DALAM PENCAPAIAN SASARAN



EVALUASI PROSES BISNIS

1. Sudah berkesinambungan antara program dengan peta proses bisnis pada 4 Bidang (Pelatihan Kerja, Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)
2. Sudah berkesinambungan antara proses bisnis dengan SOTK yang ada
3. Pada Bidang Hubungan Industrial terdapat ketidak sesuaian antara proses bisnis dengan kegiatan (Sinergitas hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja) yang seharusnya ada pada Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Pada Tahun 2020 akan dilaksanakan 34 kegiatan dari 38 kegiatan pada Tahun 2019 sehingga ada efisiensi 4 kegiatan.

TERIMAKASIH